

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Abdullah, dkk. *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.15, No.01. Juni, 2017.
- Hamzah, Ardi. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka, 2015.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga., 2010.
- Nunuk Riyani. *Analisis Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2016.
- Nunuy Nur Afiah. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Prastiwi, Dewi, dkk. *Analisis Perbandingan Kemandirian Daerah Pasca Pendaerahan BPHTB Di Kab/Kota Se-Jawa Timur*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya, 2014.
- Ramadhani, Febby Randria. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2016.
- Saputra, Dori. *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang. Padang, 2014.
- Tama, Annafi Indra. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten/Kota Di Indonesia Sebelum dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. Universitas Diponegoro. Semarang, 2014.

Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan menteri desa Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Pasal 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pengalokasian Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber Website:

<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>
(Diakses pada tanggal 18 Mei 2018)

www.ciburial.desa.id (Diakses pada tanggal 25 Mei 2018)

www.bps.go.id (Diakses pada tanggal 31 Mei 2018)

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> Diakses pada tanggal 8 Juli 2018)

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeudesada.pdf> (Diakses pada tanggal 8 Juli 2018)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40816763> (Diakses pada tanggal 16 Juli 2018)

jatim.bps.go.id (Diakses pada tanggal 2 Agustus 2018)

matamaduranews.com (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2018)

mediamadura.com (Diakses pada tanggal 14 Agustus 2018)